



Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Training Effectiveness in Improving Policy-Preveloping Capabilities For Regional Financial and Assets Management Apparatus

Tiraina Putri Siregar, Bahrum Jamil & Walid Mustafa Sembiring*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dalam studi administrasi publik yaitu dalam pembuatan kebijakan. Peneliti ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa efektif diklat untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya minat aparatur untuk mengikuti diklat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur yang efektif dalam pengambilan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Efektivitas; Pelatihan; Penyusunan Kebijakan

Abstract

Training is to improve the knowledge, skills and attitudes of an apparatus so that they can carry out their duties and work well in the study of public administration, namely in policy making. This researcher is in the form of descriptive with a qualitative approach, namely describing the data obtained from the field and explaining it in words. This study aims to describe and analyze how effective the training is to increase the capacity of the apparatus in formulating policies in BPKAD, North Sumatra Province and to identify what factors include obstacles in the implementation of training to increase the capacity of the apparatus in formulating effective policies. The phenomena in this study are the lack of interest of the apparatus in participating in the training, the lack of facilities and infrastructure to support training for effective capacity building of the apparatus in policy making at BPKAD, North Sumatra province.

Keywords: Effectiveness, Training; Policy Making

How to Cite: Siregar, T.P. Jamil. B. & Sembiring, W.M. (2023). Efektivitas Pelatihan Dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1) 2023: 13-19,



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan dan aset merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan saat ini. Hal ini karena pengelolaan keuangan dan aset menjadi fokus perhatian dalam menilai berhasil tidaknya pemerintah dalam mengelola daerah. Demikian pula penilaian yang dilakukan oleh pengawas seperti inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Pengawas Korupsi. (Silalhi dkk; 2021; Samosir dkk, 2021).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara struktural memiliki seorang sekretaris yang dibantu oleh tiga sub bagian, empat bagian yaitu bagian anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset serta memiliki dua belas sub bidang dan golongan jabatan jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya setiap hari terlihat bahwa pegawai dengan beban kerja yang tinggi ditinjau dari target organisasi dalam hal realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar dalam tenaga, waktu dan biaya yang tinggi. (Miftahuddin, 2019; Poedjianto dkk, 2019).

Peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi isu penting bagi negara berkembang karena tumbuhnya harapan akan efektifitas sentralisasi pelayanan publik dan hasil pembangunan yang berkelanjutan, harapan tersebut berimplikasi pada munculnya sejumlah peran baru bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan program. Pada era sebelumnya, pemerintah daerah di negara berkembang lebih banyak menjadi pelaksana kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Kini pemerintah memiliki lima peran domestik baru, yaitu sebagai penyedia layanan, fasilitator antara pemerintah dan non-pemerintah, mediator antar suku dalam komunikasi dan jaringan, dan kualitas atau globalisasi dan revolusi informasi. (Kurniaty 2020; Rejeki 2021).

Adanya peran baru tersebut agar aparatur memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya, namun hingga saat ini masih sangat sedikit aparatur di negara berkembang yang memiliki jenis dan tingkat kemampuan yang sesuai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. (Hakim dkk, 2019; Silalahi dkk, 2021). Padahal tanpa pelatihan pada suatu instansi, maka kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat rendah dalam meningkatkan kemampuan merumuskan kebijakan secara efektif, maka aparatur memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah peralatan. (Dhuhri dkk, 2021; Dwika, 2020).

Pelatihan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengambilan kebijakan. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pengembangan kompetensi tersebut melalui pelatihan, selama masa orientasi atau calon aparatur proses pelatihannya terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, kepribadian unggul dan bertanggung jawab. karakter dalam memperkuat profesionalisme dan kompetensi. (Lubis dkk, 2021; Endang dkk, 2021).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pelatihan. Langkah ini dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukannya. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. (Sari dkk, 2020; Dharma, 2021).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kapasitas aparatur dalam perumusan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pelatihan agar kebijakan yang dilaksanakan di BPKAD berjalan efektif, dengan berjalannya suatu kebijakan secara efektif, sehingga tugas pokok dan fungsinya suatu aparatur dilakukan secara efektif untuk mencapai kebijakan tersebut. sesuai. Aparatur BPKAD Provinsi Sumatera Utara memerlukan pelatihan agar mampu merumuskan

kebijakan secara efektif dalam peningkatan kapasitas aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, karena salah satu tugas pokok badan tersebut adalah perumusan kebijakan untuk mengelola keuangan dan aset daerah. (Sukmawati dkk, 2020; Hasibuan dkk, 2020).

Sangat jelas bahwa diklat ini pada hakekatnya memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kemajuan suatu instansi, namun ada diklat yang berjalan lancar dalam arti manfaat besar bagi aparatur dapat dirasakan tetapi tidak ada keberhasilan dari diklat tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sekilas penulis memberikan gambaran, permasalahan yang sering terjadi adalah aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara kurang serius mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam pengambilan kebijakan, mereka mengikuti kegiatan ini hanya sebagai kewajiban sehingga setelah kegiatan pelatihan selesai tidak ada perubahan. yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pelatihan belum mampu memberikan kesadaran kepada aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga aparatur yang telah mengikuti diklat belum memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan yang efektif. (Ketike dkk, 2021; Sinulingga dkk, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Madras Hulu, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara di Lantai 7 Gedung Bank Sumut. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan membantu aparatur dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan efektifitas, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini terdapat 4 pelatihan yang telah dilakukan dalam rangka membantu aparatur melakukan proses peningkatan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan di BPKAD PROVSU. Untuk lebih jelasnya, 4 pelatihan yang telah dilaksanakan di BPKAD dalam proses perumusan kebijakan dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini:

Yang pertama adalah Pelatihan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dalam pelatihan pelayanan administrasi perkantoran di BPKAD PROVSU dalam meningkatkan kemampuan perumusan kebijakan bagi aparatur BPKAD PROVSU sudah efektif karena kemampuan aparatur dalam perumusan kebijakan dan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah dilaksanakan setelah pelatihan pelayanan administrasi perkantoran agar dalam pembuatan surat menyurat dan pemberian administrasi perkantoran semakin cepat dan akurat.

Kedua, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah instansi yang mengelola anggaran, perbendaharaan dan perbendaharaan daerah, serta melaksanakan dan mengawasi aset atau anggaran yang telah dikelola agar dapat dipertanggungjawabkan dan dilimpahkan. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di BPKAD PROVSU dalam meningkatkan kemampuan merumuskan kebijakan materi yang telah diberikan secara keseluruhan berjalan efektif, setelah melakukan uji coba yang dilakukan setelah pelatihan semua

materi dalam pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berjalan efektif dan aparatur juga dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

PROVSU BPKAD mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset daerah yang menyangkut pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan daerah secara efektif agar dapat mengefektifkan pengelolaan tersebut, sehingga BPKAD dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal peningkatan kapasitas aparatur pembuat kebijakan dan tugas pokok aparatur di BPKAD. Kapasitas sumberdaya apartemen yang dimaksud adalah sumberdaya apartemen yang efektif dan berkualitas. Untuk memperoleh kapasitas sumber daya aparatur yang efektif dan berkualitas, BPKAD PROVSU menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan bagi aparatur. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan wawasan dan wawasan aparatur semakin efektif untuk dapat melaksanakan materi yang diajarkan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam perumusan kebijakan di bidang undangan terkait peningkatan keuangan daerah ke kabupaten/kota, pelatihan dan bimbingan teknis tata cara evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, lokakarya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi. Setelah pelatihan dan materi yang diajarkan, kami menguji materi yang diajarkan dalam pelatihan, apakah pelatihan tersebut efektif, setelah kami menguji materi pelatihan, Nak, kami melihat bahwa pelatihan ini berjalan dengan efektif, materi meningkatkan kemampuan aparatur dalam perumusan kebijakan bidang untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparturer adalah bimbingan teknis sistem pemerintahan daerah, sosialisasi pajak PPN, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peningkatan keuangan daerah ke kabupaten/kota, pelatihan dan bimbingan teknis tata cara evaluasi APBD dan pertanggungjawaban. untuk pelaksanaan APBD, workshop penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemprov secara keseluruhan berjalan efektif.

Ketiga, pelatihan untuk meningkatkan pengembangan kinerja dan sistem pelaporan kinerja keuangan. Pelatihan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan pencapaian keuangan dalam perumusan kebijakan telah berjalan efektif karena setelah diujicobakan setelah pelatihan BPKAD mengukur efektifitas aparturnya dalam menjalankan proses dalam peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan pencapaian keuangan . Dari informasi uji coba setelah pelatihan dilaksanakan di BPKAD, kesimpulan dari pelatihan peningkatan pengembangan kinerja dan sistem pelaporan pencapaian keuangan ini cukup efektif karena dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan pendokumentasian laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (LAKIP). penetapan kinerja, penyusunan anggaran kas pemerintah provinsi dan perubahan APBD, penyusunan laporan realisasi belanja pemerintah dan daerah, pengelolaan pajak PPN dan PPh, penyusunan laporan realisasi APBD semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya cukup baik dalam proses persiapan dan sangat akurat.

Keempat, pelatihan peningkatan kapasitas bagi institusi pemerintah daerah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas instansi pemerintah daerah mengenai mekanisme kerja, struktur organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah. Sasaran pelatihan ini adalah terbentuknya struktur organisasi yang sesuai, kinerja kelembagaan yang tinggi, terjalannya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintah daerah, antara organisasi pemerintah dengan masyarakat dan tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik. Dalam penelitian ini peneliti mengukur efektivitas pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, indikator kinerja utama sasaran strategis sesuai dengan materi utama yang diberikan oleh BPKAD PROVSU yaitu peningkatan kualitas sistem pengelolaan kas pelayanan, evaluasi APBD kabupaten/kota, rekonsiliasi dana perimbangan pemerintah kabupaten/kota, penyusunan dan rekapitulasi data

APBD kabupaten dan kota, penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara. Maka setelah pelatihan diadakan uji coba apakah setelah dilakukan pelatihan aparatur lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas instansi pemerintah daerah, dan setelah diuji cukup baik dalam proses persiapannya dan sangat akurat.

Efektivitas pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengambilan kebijakan dapat dilihat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh streers (1986:53), yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan di bawah ini:

a) Pencapaian Tujuan, agar pencapaian tujuan akhir lebih terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti mempertahankan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: jangka waktu dan pencapaian target yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan pelatihan di Kantor PROVSU BPKAD bersifat tentatif, artinya pelatihan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan target utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan diklat ini adalah memberikan wawasan, peningkatan produktivitas dan kapabilitas aparatur yang tentunya juga akan berdampak pada kemajuan BPKAD PROVSU. Setelah mengikuti pelatihan, BPKAD sangat berharap agar aparatur dapat memahami bidang tugasnya masing-masing, khususnya dalam pengambilan kebijakan. Kegiatan pelatihan ini dirancang dengan sebaik-baiknya dari aparatur baru hingga aparatur lama dan tentunya masing-masing memiliki manfaat tersendiri. Namun ada beberapa pejabat lama yang kurang setuju dengan hal tersebut dan mereka berharap dengan adanya kegiatan pelatihan ini terutama bagi pejabat baru yang tentunya masih muda agar lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan.

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat tersendiri bagi aparatur tetapi juga memberikan manfaat tersendiri bagi BPKAD, yaitu dalam meningkatkan kemampuan merumuskan kebijakan yang efektif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, menciptakan citra BPKAD yang baik, dan meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. bawahan.

b) Integras, keterpaduan artinya mengukur tingkat kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan diklat dalam upaya peningkatan kapasitas dalam pengambilan kebijakan sebagai aparatur di BPKAD PROVSU. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses pelatihan, kemampuan aparatur dalam penyesuaian kebijakan dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses pelatihan yang dilakukan oleh aparatur dan seberapa jauh aparatur yang akan mengikuti diklat mengetahui informasi yang diperoleh dari pelatihan. pelatihan, apakah mereka mengerti atau bahkan mengerti. di sisi lain misalnya dalam pelatihan pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, dalam pelayanan administrasi perkantoran ada 2 proses, yang pertama adalah pemberian layanan surat menyurat dan pemberian layanan komunikasi, setelah ini pelatihan yang dilakukan akan lebih banyak sosialisasi, anak dari sana melihat apakah pelatihan yang telah dilakukan efektif atau tidak efektif, misalnya apakah dalam surat menyurat ada masalah atau tidak efektif dalam pelayanan surat menyurat dan dalam penyediaan layanan komunikasi ada kendala dari sosialisasi yaitu mentor Pelatih melihat apakah pelatihan sudah efektif.

c) Adaptasi, adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pelaksanaan diklat ini tentunya kita membutuhkan pelaksana yang baik dalam perumusan kebijakan yang akan memberikan materi selama pelatihan. Jumlah pelaksana, pengelola dan instruktur kegiatan ini sangat memadai, karena pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan kebijakan ini adalah jenis yang dilaksanakan di BPKAD PROVS itu sendiri, para dosen atau pemberi

materi juga diambil dari BPKAD sendiri yaitu aparatur yang telah menjadi senior di bidangnya dan telah mengikuti pelatihan guna menjadi pembawa materi pelatihan.

Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya minat aparatur untuk mengikuti diklat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur yang efektif dalam pengambilan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kurangnya minat tersebut memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya peningkatan kapasitas pengambilan kebijakan bagi aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:

Faktor Pendukung, a) Manajemen waktu yang tepat; b) Pengetahuan dan penguasaan materi yang luas dari tim pelatih; dan c) Fasilitas yang memadai.

Faktor Pendukung, a) Kurangnya minat aparatur dalam melaksanakan proses pelatihan; dan b) kurangnya disiplin administrasi dalam melaksanakan proses pelatihan

SIMPULAN

Kesimpulan dari peneliti ini adalah pelaksanaan diklat peningkatan kemampuan aparatur dalam pembuatan kebijakan sudah efektif karena secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tepat serta penggunaan waktu sangat efektif dalam proses diklat. Setelah mengevaluasi pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam perumusan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi banyak aparatur telah mengalami perubahan peningkatan kemampuan aparatur BPKAD dalam merumuskan kebijakan dan perubahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparatur di BPKAD. Hal ini terjadi karena setelah mengikuti pelatihan terjadi peningkatan kompetensi baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku peserta pelatihan secara umum menjadi lebih efektif, selain itu kesadaran di dalam aparatur untuk menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih baik. dan kinerja mereka meningkat dari pelatihan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *PERSPEKTIF*, 9(2), 465-482.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenanda Media Group
- Dharma, S. (2021). Membangun Kesadaran Global Warga Negara: Studi Kebijakan Publik Di Era Pandemi Covid 19. *PERSPEKTIF*, 10(1), 248-254. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4671>
- Duhuri, A., Isnaini, I., & Lubis, M. (2021). Analisis Kebijakan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2019 Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kelurahan Sibuluan Indah. *PERSPEKTIF*, 11(1), 124-130. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5363> doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Endang, L., Sihombing, M., & Lubis, M. (2021). Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui Sicantik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(1), 107-123. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5353>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hakim, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 131-137
- Hartomo, (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*. Bandung : Alfabeta.
- Hartomo, (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, E., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). *Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan*
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

- Ketike, R., Harahap, R., & Siregar, N. (2021). Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 99-117. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.726>
- Kurniaty, E. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 227-234. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280>
- Lubis, A., Badaruddin, B., & Salmaniah Siregar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Bendahara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II. *PERSPEKTIF*, 11(1), 98-106. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5351>
- Miftahuddin. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 213-228.
- Muda, I. (2017). Analisis Kebijakan. Medan Persada.
- Poedjiyanto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43-51.
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 59-64. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.481>
- Samosir, F., Badaruddin, B., & Siregar, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. *PERSPEKTIF*, 11(1), 272-285. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5520>
- Sari, R., & Rahayu, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *PERSPEKTIF*, 10(1), 230-238. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4355>
- Siagian, S.P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, B., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. *PERSPEKTIF*, 11(1), 160-168. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5367>
- Silalahi, B., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Steers, R.M. (2005). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sukmawati, N.L.P.R. & Budiana, I.N. (2020). Menguji Taji Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 100-110